

POLA SOSIALISASI POLITIK PADA PEMILIH GUNA MEMINIMALISIR GOLPUT DALAM PEMILUKADA

Lolita Permanasari¹, Jamil²

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstraksi :

Dorongan untuk penelitian ini didukung oleh abstain data yang signifikan kepada penulis rekap dari berbagai sumber, baik jurnal dan media massa. Untuk kondisi abstain seluruh negeri dengan rasio antara jumlah abstain dalam pemilihan Jawa dan luar daerah Jawa adalah 30% berbanding 29%. Sementara pada pelaksanaan pemilu yang digelar di seluruh wilayah negara menunjukkan tingginya jumlah abstain pada pemilih di kota Surabaya, 50,36%, yang merupakan jumlah terbesar dari non-pemilih di negara ini. Terkait dengan fenomena penelitian ini berfokus pada pembuatan Pola Sosialisasi Politik Untuk Minimalkan Pemilih Golput Dalam studi General Election. This ditargetkan dapat menilai dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya non-pemilih di kota Surabaya pada walikota pemilu dan pemilihan gubernur yang telah dilaksanakan. Jenis penelitian ini adalah eksplorasi, dengan stratified random sampling dan analisis Interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarik faktor / tarik abstain antara lain: memilih hak bukan kewajiban, sehingga dapat diabaikan oleh para pemilih, jumlah penduduk perkotaan di Surabaya, undangan yang diberikan petugas tidak pemilih di elit daerah perumahan, dan kejenuhan pemilih pada jenis pemilu yang run. As untuk faktor pendorong / dorongan antara lain: sistem pelatihan sosialisasi melalui media sosial, mengajak pemilih pemula untuk menjadi sukarelawan, dan memanfaatkan seni media lokal sebagai sarana sosialisasi. Pola sosialisasi yang telah dilakukan penyelenggara pemilu meliputi: tatap muka Communi kation, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi seni lokal dan media sosial.

Kata kunci: Sosialisasi Politik, Pemilih, pemilihan kepada daerah

Abstract

The impuls for this study was supported by the data abstentions significant to the author recaps from various sources, both journals and the mass media. For the abstentions conditions throughout the country with a ratio between the number of abstentions in the elections of Java and outside Java region was 30% versus 29%. Meanwhile on the implementation of the election which was held in all regions of the country showed a high number of abstentions on the voters in the city of Surabaya, 50.36%, which is the largest number of non-voters in the country. Related to the phenomenon of this research focuses on the manufacture of Political Socialization Patterns In order to Minimize Voter Abstentions In the General Election. This study is targeted to be able to assess and identify factors that trigger the occurrence of non-voters in the city of Surabaya on mayoral election and governor election that have been implemented. This type of research is exploratory, with stratified random sampling and analysis interaktif. Research result shows that the factor towing / pull the abstentions among others: choosing the right but not the obligation, so it can be ignored by the voters, the number of urban residents in Surabaya, invitation given the clerk not to the voters in the elite residential area, and the saturation of voters on the kind of election that is run. As for the factors driving / push among others: training system of socialization through social media, invites voters beginner to volunteer, and utilizing local art media as a means of socialization. Patterns of socialization has been done election organizers include: face-to-face communi cation, communication through the mass media and the mobilization of local art and media social.

Keywords: Political socialization, Voters, election to the regions

¹ *Alamat Korespondensi* : Lolita_sari@yahoo.com

² *Alamat Korespondensi* : jamiljurist@gmail.com

A. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Pendahuluan

Pelaksanaan pilkada di Indonesia telah dimulai sejak bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2007 ternyata telah mengukir sejarah pemilu tersendiri, mengingat munculnya fenomena golput yang semakin tinggi.

Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah golput dengan peringkat tertinggi di Indonesia. Data golput pada pemilihan Walikota dan pemilihan Presiden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Pemilu di Surabaya

N O	Jenis Pemilihan	Tahun	Hasil Suara	Jumlah Pemilih	Jumlah Golput	Prosentase
1.	Pilwali	2005	999.894	1.934.228	934.334	48,3%
2.	Pilwali	2010	1.012.612	2.142.899	1.130.727	52,7%
3.	Pilpreputaran I	2004 (Juli)	1.485.336	2.010.003	524.667	26,1%
4.	Pilpreputaran II	2004 (September)	1.427.125	2.003.553	576.428	28,7%
5.	Pilpreputaran III	2009	1.120.981	2.161.706	1.040.725	28,1%

Sumber : KPU Kota Surabaya tahun 2014

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilukada dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat. Adapun salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota menjadi fasilitator kepada masyarakat guna meminimalisir pemilih yang golput pada setiap pelaksanaan pemilu termasuk pemilukada.

Program KPU Kota Surabaya dalam mensosialisasikan pemilukada ke semua ko-

munitas. Seperti komunitas PKL, mahasiswa, perkampungan maupun perumahan, termasuk komunitas minoritas lokalisasi pun di selenggarakan demi mensukseskan Pemilukada sehingga dapat meminimalisir angka golput. Pada pelaksanaan pemilukada Gubernur (Pilgub) tahun 2013 angka golput di Surabaya dari total pemilih yang mencapai 2.125.173 jiwa, yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.119.596 jiwa (52,78%). Tingginya angka golput di Surabaya menjadi tugas berat KPUD Surabaya untuk merombak pola sosialisasi yang tepat sesuai dengan kondisi obyek tif pemilih golput agar mau menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai warga Negara yang baik, mengingat pemerintah sudah mengeluarkan dana yang besar akan sebanding dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih.

Sosialisasi politik merupakan mata rantai paling penting diantara sistem – sistem sosial dan sistem politik. Sosialisasi politik menurut Almond (Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew, 2001), bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai – nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing – masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap – sikap politik dan pola – pola tingkah laku politik. (Komarudin Sahid, 2011:198)

Sedangkan menurut Herbert Hyman (Rush dan Althoff, 2005) sosialisasi politik adalah cara – cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi –posisi kemasyarakatan yang diketengahkan melalui badan-badan masyarakat. (Komarudin Sahid, 2011:198).

Adapun kajian penelitian tentang pemilukada yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dicermati dalam table 2 berikut :

Tabel 2. Penelitian Pendahulu Terkait Dengan Pemilukada

Tahun	Nama Peneliti	Topik/Judul	Luaran Penelitian
2005	Bambang, RE.	Pilkada di Jawa Timur	Angka golput yang tinggi dan kemenangan incumbent
2005	Syamsul Hadi Thubany	Pilkada Bima 2005 era baru demokrasi local di Indonesia	Kualitas pilkada dipengaruhi oleh sosialisasi pemilih dan kampanye pilkada damai.
2006	Irtanto	Konflik pilkada Kab. Banyuwangi Jawa Timur	Terdapat pergeseran patronase yang disebabkan factor maturitas elit politik local yang rendah yang memicu konflik karena tidak dapat menerima kekalahan calonnya.
2007	Ratna Setyarahajoe	Pilkada proses pendewasaan politik masyarakat local	Masyarakat daerah lebih dominan berbudaya politik subyek dan parochial dibandingkan budaya politik partisipan, sehingga mudah untuk dimobilisir bagi kepentingan calon.
2008	J. Kaloh	Demokrasi dan kearifan local pada pilkada langsung	Pilkada merupakan proses pembelajaran politik bagi semua <i>stakeholders</i> yang terlibat untuk menggunakan hati nuraninya

			karena ada jarak emosi antara figure calon dan massa pemilinya yang memicu lahirnya fanatisme yang kuat.
2009	Irtanto	Persepsi masyarakat kota Surabaya terhadap pelaksanaan pilkada	97% pemilih merasa tidak pernah mendapat sosialisasi.
2010	Moch. Nurhasim	Konflik Dalam Pilkada Langsung	Perlunya diatur kejelasan pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pilkada, khususnya aspek pidana dan administrative termasuk tahapan sengketa dan pengajuan gugatan.
2013	Ratna Setyarahajoe	Mapping Conflict Anarkhists Between The Election Candidate Support Regional Head (General Election) District In Indonesia And Prevention Through Communications Political Formula	Upaya pencegahan konflik anarkis dalam pemilukada di Indonesia dibutuhkan formula komunikasi politik yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Efek komunikasi politik berupa terciptanya pemahaman target politik (simpatisan dan pemilih) untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional, elegan dan

			damai dapat tercapai.
--	--	--	-----------------------

2. Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Adapun **permasalahan** yang diangkat dalam Penelitian ini adalah : a) Bagaimana menemukan *pull and push factor* pemilih golput dalam pemilukada di Surabaya ? dan b) Bagaimanakan Membuat pola sosialisasi yang tepat pada pemilih guna meminimalisir golput dalam pemilukada di Surabaya?.

Tujuan Penelitian ini adalah : a) menemukan *pull and push factor* pemilih golput dalam pemilukada di Surabaya ? dan b) Membuat pola sosialisasi yang tepat pada pemilih guna meminimalisir golput dalam pemilukada di Surabaya.

3. Tinjauan Pustaka

3.1.Sosialisasi Politik

Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai social yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya.

Pengertian sosialisasi menurut beberapa sosiolog :

- Charlotte Buhler : Sosialisasi adalah proses individu-individu yang belajar dan menyesuaikan diri.
- Peter Berger : sosialisasi adalah suatu proses dimana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.
- Bruce J. Cohen : Sosialisasi adalah proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat.

Sosialisasi politik menurut Almond (Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew, 2001), bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai – nilai politik, yang menunjukkan bagaimana se-

harusnya masing–masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap – sikap politik dan pola–pola tingkah laku politik. (Komarudin Sahid, 2011:198). Beberapa tujuan dalam sosialisasi yaitu, sebagai berikut :

- Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seorang kelak di tengah-tengah masyarakat tempat dia menjadi salah satu anggotanya.
- Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan bercerita.
- Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat.
- Membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat.

Sosialisasi politik merupakan mata rantai paling penting diantara sistem – sistem sosial dan sistem politik. Sosialisasi politik menurut Almond (Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew, 2001), bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai – nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing–masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap– sikap politik dan pola – pola tingkah laku politik. (Komarudin Sahid, 2011:198)

3.2. Golput

Golput atau golongan putih yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Abstain adalah tindakan untuk tidak memilih dengan tidak menggunakan suaranya dalam pemilihan umum. Seseorang yang melakukan golput di kontraskan dengan "memberikan suara kosong" dimana seseorang yang golput membe-

rikan suara yang tidak valid / tidak sesuai dengan cara dengan sengaja menandai item yang salah atau tidak mengisinya sama sekali atau tidak menggunakan hak pilihnya.³

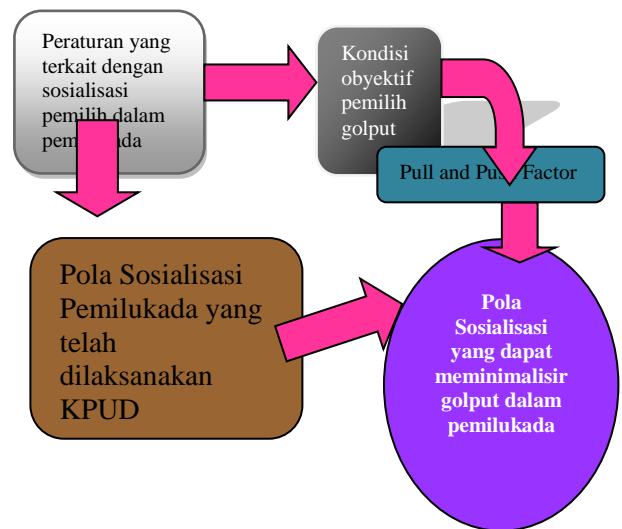
Golput merupakan hak setiap warga negara dan merupakan pilihan siapapun, tapi jelas bukan pilihan yang bertanggung jawab. Karena dengan golput, bahwa warga negara tersebut menunjukkan ketidakpedulian dengan nasib bangsa sendiri dan tidak mendukung terciptanya suasana demokrasi.

3.3. Pemilukada

Pemilukada merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi dalam prespektif politik, dimana terjadi proses transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah (*Lili Romli, 2005: 16*). Melalui pemilukada rakyat daerah dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia.

Lembaga Negara yang berwenang menyelenggarakan pemilukada adalah KPUD, dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Lebih jelasnya, pada paragraf 3, pasal 10 ayat 3 butir e disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan pemilukada adalah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangan dengan berpedoman pada KPU dan/atau KPU Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya pada penyelenggaraan pemilukada, KPU Kabupaten/ Kota diawasi oleh lembaga pengawas pemilu yaitu Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu lapangan, dan Panwaslu Luar Negeri (*UU No.22 Tahun 2007*).

Gambar 1. Pola Yang Digunakan



B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat teknis aplikatif dengan pendekatan pendekatan politik hukum. Target penelitian adalah membuat pola sosialisasi politik yang tepat yang sudah disesuaikan dengan kondisi obyektif pemilih guna meminimalisir golput dalam pemilukada.

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya (representasi dari masyarakat kota besar dengan tingkat heterogenitas yang tinggi) yang memiliki pemilih golput tertinggi dalam pemilukada di Indonesia (52,7 %).

Penetapan unit analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling pada pemilih golput, serta key informan pada KPUD Surabaya.

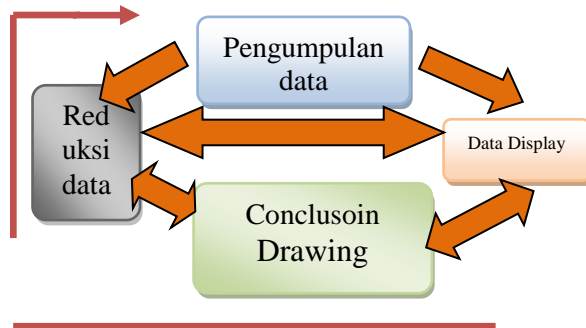
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara pada unit analisis dengan menggunakan *interview guide*.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis *interaktif*, dimana dalam analisis ini terdiri dari 3 komponen analisis yaitu ; 1. Reduksi data, 2. Sajian data, dan 3 penarikan kesimpulan.

³ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2310207-pengertian-golput>

Gambar 2. Model Analisis Interaktif



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengetahuan tentang pemilu

Pengetahuan pemilih tentang adanya pemilu cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dari jawaban para pemilih terhadap pertanyaan dalam kuesioner yang kami ajukan yaitu apakah anda mengetahui tentang pelaksanaan pemilu? dari seratus responden yang kami tanya kan tidak satupun responden yang menjawab tidak tahu semua responden menjawab mengetahui. Akan tetapi ketika kami menanyakan darimanakah anda mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemilu? Jawaban responden sangat beragam. Dari seratus responden yang kami tanyakan hanya 33 orang yang terdiri dari 7 pemilih pemula, 16 pemilih dari kalangan pendidik dan 10 pemilih dari kalangan PNS mengaku mengetahui informasi pelaksanaan pemilu dari sosialisasi yang diadakan oleh KPU disamping dari atribut kampanye yang tersebar diberbagai tempat. Sedangkan sisanya mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari penyelenggara pemilu baik sosialisasi yang dilakukan oleh kpu maupun panwaslu kota Surabaya. Dari 100 responden yang kami surve kebanyakan mengetahui tentang pelaksanaan pemilu dari atribut kampanye yang tersebar dipinggir-pinggir jalan dan TV.

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu masih sangat lemah padahal Pasal 10 ayat 3 huruf q mengamanahkan kepada KPU kabu

paten untuk melakukan sosialisasi pemilu “ melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.” Terhadap ketentuan ini KPU pusat telah membentuk pedoman pelaksanaan sosialisasi dengan mengeluarkan PKPU No. 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi meliputi :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa regulasi diatas jelas mengamanahkan kepada KPU selaku penyelenggara Negara untuk melakukan sosialisasi pada pemilih, namun bila dilihat dari hasil survei diatas pelaksanaan sosialisasi masih perlu ditingkatkan kembali.

2. Ketertarikan pada calon

Ketertarikan pemilih pada calon kepala daerah juga mendapatkan respon yang sangat sedikit. Hal ini terbukti dari 100 responden yang kami tanyakan 17 orang yang menyatakan tertarik pada calon kepala daerah dan aneknya lagi yang menyatakan tertarik pada calon bukan dari kalangan orang berpendidikan tetapi dari kalangan pekerja pabrik, kalangan supir angkot dan pemilih pemula. Sedangkan yang lain mengaku tidak tertarik pada calon yang di usung baik oleh partai politik maupun calon perseorangan.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa peran dan fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik belum berjalan secara maksimal. Dalam Pasal 10 Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa Tujuan partai politik dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1. Tujuan umum Partai Politik terdiri dari :
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan dalam Pasal 29 Undang-undang No. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dijelaskan bahwa tugas-tugas partai politik adalah melakukan rekrutmen pada :

1. anggota Partai Politik;
2. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
4. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden

Melihat ketentuan tentang partai politik di dua undang-undang yang berbeda tersebut, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa partai politik mempunyai kewajiban melakukan rekrutmen kader-kader pemimpin Negara baik pusat maupun daerah dan memperkenalkan kadernya tersebut melalui pendidikan politik yang menjadi salah satu fungsi dari partai politik. Namun bila melihat dari hasil survei yang telah kami lakukan nampak jelas bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik belum menyentuh pada masyarakat luas. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terkesan hanya formalitas dan hanya bertujuan untuk mencairkan anggaran saja sehingga tidak semua kalangan dapat mengenal kualitas kader yang diusung oleh partai politik untuk menjadi pimpinan daerah.

3. Penggunaan Hak Memilih

Dalam hal penggunaan hak memilih dari 100 responden yang kami tanyakan terdapat 20 orang yang mengaku tidak menggunakan hak memilihnya (golput). Penyumbang golput terbesar dari 100 responden yang kami tanyakan adalah kalangan pemilih pemula

yang mencapai jumlah 15 orang sisanya adalah 3 buruh pabrik 1 orang dari PNS dan satu orang lagi dari kalangan pendidik.

Kami memang tidak menanyakan lebih lanjut alasan ketidak tertarikan mereka dalam menggunakan hak memilih mereka pada Pilwali Surabaya dalam kuesioner yang kami sebar. Tetapi ketika hal ini kami konfirmasi pada penyelenggara pemilu melalui wawancara yang kami lakukan terdapat jawaban yang sangat beragam. Menurut ketua KPU Surabaya Bapak **Robiyan Arifin** ada beberapa penyebab kenapa angka golput masih signifikan di Surabaya. *Pertama*, karena memilih itu merupakan hak bukan kewajiban sebagai mana aturan di Australia. *Kedua* kota Surabaya merupakan kota metropolitan dan banyak penduduk urban sehingga mereka tidak mempunyai ikatan emosional dengan para calon dan banyak juga yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) sehingga tidak mempunyai hak memilih di Surabaya. *Ketiga* warga Surabaya juga banyak para pengusaha yang bertempat tinggal diperumahan namun kebanyakan pulang dari kantor tempat mereka bekerja sore hari dan tiba kerumah sudah larut malam. Sementara itu, petugas penyelenggara pemilu yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) menghantarkan undangan ke perumahan-perumahan tersebut pada siang hari yang hanya ditemui oleh anjing mereka.

Sedangkan menurut ketua Panwaslu Surabaya bapak Wahyu mengatakan bahwa salah satu penyebab angka golput masih signifikan di Kota Surabaya adalah karena masyarakat sudah jenuh dengan pemilihan yang sudah sangat sering dilaksanakan mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Gubernur Jatim, Pemilihan Wali Kota bahkan hingga pemilihan kepala desa di desanya masing-masing. Ketua KPU juga berpendapat sama dengan KPU bahwa penduduk urban juga menjadi faktor pemicu banyaknya Golput di Surabaya.

4. Pola Sosialisasi Pemilu Oleh KPU

Pengertian yuridis sosialisasi pemilu dapat kita temukan pada pasal 1 angka 7 perpu No. 11 tahun 2010 Tentang Pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (PKPU Tentang Pedoman Sosialisasi) adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pola atau Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan oleh KPU meliputi : komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi social. Sedangkan objek sasaran sosialisasi adalah :

- a. Masyarakat umum (publik);
- b. Remaja, pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula);
- c. Perempuan;
- d. Pengemuka pendapat;
- e. Petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;
- f. Wartawan dan kelompok media lainnya;
- g. TNI/Polri;
- h. Partai Politik;
- i. Pengawas/Pemantau Pemilu;
- j. LSM;
- k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.

Dalam wawancara yang kami lakukan dengan KPU Surabaya, Komisioner KPU menjelaskan bahwa khusus untuk masyarakat yang mellek (memahami) internet khususnya pemilih pemula yang terdiri dari siswa SMA dan sederajat serta mahasiswa semester awal KPU Surabaya akan mendisain dan mengadakan pelatihan sistem sosialisasi melalui media social. Jadi KPU akan mengajak para pemilih pemula untuk menjadi relawan yang mem

bantu mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilu melalui berbagai jejaring social seperti facebook, twiter dll.

Pola sosialisasi lain yang dilakukan oleh KPU Surabaya adalah memanfaatkan media seni local seperti pagelaran ludruk, pembuatan karikatur, dangdutan dan lain-lain, disamping itu KPU Surabaya dalam rangka melakukan sosialisasi tahapan pemilu ini juga melakukan mobilisasi social seperti jalan sehat atau gerak jalan yang diikuti oleh semua penyelenggara pemilu mulai dari KPU hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan juga masyarakat umum dengan menggunakan atribut ke pemilu seperti kaos yang sudah disablon dan bertuliskan ajakan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu.

Dalam power point bimtek yang kami dapatkan dari KPU Surabaya Pola sosialisasi pemilu meliputi :

1. Komunikasi tatap muka;
2. Media massa;
3. Bahan sosialisasi;
4. Mobilisasi social
5. Pemanfaatan budaya local/tradisional
6. Laman kpu provinsi/KIP aceh dan/atau
7. Papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU kabupaten/Kota
8. Media social
9. Media kreasi; dan/atau
10. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi pemilihan dengan baik.

Adapun materi sosialisasi dalam Pasal 5 PKPU tentang Pedoman sosialisasi dibagi ke beberapa pokok tahapan penting dalam tahapan pelaksanaan pemilu yang meliputi:

1. Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih, meliputi antara lain :
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

- c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
2. Materi sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain:
 - a. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - e. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - f. Pengundian dan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Materi sosialisasi kampanye, antara lain :
 - a. Regulasi kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Laporan Dana Kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Materi sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - d. Pengumuman hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengesahan dan Pengangkatan;
6. Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu;
7. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

5. Pola Sosialisasi oleh Panwaslu Surabaya

Peneliti tidak menemukan satu pasal pun baik di Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu maupun dalam undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang baru yang mengatur tentang kewajiban panwaslu untuk melakukan sosialisasi pemilu.

Dalam wawancara kami dengan komisioner panwaslu kota Surabaya, ketua panwaslu memberikan penjelasan bahwa panwaslu memang tidak pernah merancang pola sosialisasi akan tetapi sering terlibat dalam melakukan sosialisasi karena di undang oleh beberapa organisasi untuk menjadi pembicara dalam acara sosialisasi. Menurut ketua KPU Surabaya dalam acara pilkada serentak yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2015 ini panwaslu akan mengadakan sosialisasi berupa kegiatan tatap muka dengan beberapa kelompok pemilih terutama kelompok pemilih pemula.

Dari pola sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di atas, peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan hanya proses transfer pengetahuan tahapan dan teknis pemilu tetapi tidak melakukan proses mentransfer kesadaran pada pemilih bahwa partisipasi semua masyarakat dalam pemilu itu penting dalam rangka menguatkan demokrasi di Indonesia. Sosialisasi hendaknya dimaknai sebagai pendidikan politik. Dan bila sosialisasi dimaknai sebagai pendidikan, maka sosialisasi tidak hanya proses penyampaian tahapan tetapi proses mendidik pemilih agar menjadi pemilih yang sadar dan cerdas. Oleh karena

nya proses sosialisasi menurut kami tidak hanya dilakukan menjelang terlaksananya pemilihan saja tetapi hal itu melekat pada tugas dan fungsi penyelenggara pemilu selama dia bertugas.

D. Kesimpulan

Dari data sementara yang telah berhasil peneliti dapatkan sebagaimana telah diuraikan dalam bab hasil yang dicapai (bab 5) di atas, maka kesimpulan sementara yang dapat peneliti sarikan adalah sebagai berikut : Pola komunikasi yang berkembang dalam sosialisai Pola atau Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan oleh KPU meliputi : komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi social. Sedangkan objek sasaran sosialisasi adalah :

1. Masyarakat umum (publik);
2. Remaja, pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula);
3. Perempuan;
4. Pengemuka pendapat;
5. Petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;
6. Wartawan dan kelompok media lainnya;
7. TNI/Polri;
8. Partai Politik;
9. Pengawas/Pemantau Pemilu;
10. LSM;
11. Pemilih dengan kebutuhan khusus.

Adapun factor penarik yang menghambat Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terkesan hanya formalitas dan hanya bertujuan untuk mencairkan anggaran saja sehingga tidak semua kalangan dapat mengenal kualitas kader yang diusung oleh partai politik untuk menjadi pimpinan daerah. Peneliti tidak menemukan satu pasalpun baik di Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu maupun dalam undang-undang tentang pemilihan gubernur, bu

pati dan walikota yang baru yang mengatur tentang kewajiban panwaslu untuk melakukan sosialisasi pemilu.

Sedangkan factor pendorong yang dapat meningkatkan fungsi sosialisasi bila sosialisasi dimaknai sebagai pendidikan, maka sosialisasi tidak hanya proses penyampaian tahapan tetapi proses mendidik pemilih agar menjadi pemilih yang sadar dan cerdas. Oleh karenanya proses sosialisasi menurut kami tidak hanya dilakukan menjelang terlaksananya pemilihan saja tetapi hal itu melekat pada tugas dan fungsi penyelenggara pemilu selama dia bertugas

Sebagai masukan dan saran dari peneliti, sosialisasi hendaknya dimaknai sebagai pendidikan politik. Dan bila sosialisasi dimaknai sebagai pendidikan, maka sosialisasi tidak hanya proses penyampaian tahapan tetapi proses mendidik pemilih agar menjadi pemilih yang sadar dan cerdas. Oleh karenanya proses sosialisasi menurut kami tidak hanya dilakukan menjelang terlaksananya pemilihan saja tetapi hal itu melekat pada tugas dan fungsi penyelenggara pemilu selama dia bertugas

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kaloh, J., 2008, *Demokrasi Dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Mas'ood, Mochtar dan Colin Mac Andrew, 2001, *Perbandingan Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : Rajawali.
- Sahit, Komarudin, 2011, *Memahami Sosiologi Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutopo, H.B, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Thubany, Syamsul Hadi, 2005, *Pilkada Bima 2005 Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia*, Tuban : Swagiri.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu
- Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan wakil Kepala daerah.

C. Jurnal

- Bambang, RE, 2005, *Pilkada Di Jawa Timur*, Jurnal Issue Sentral, Edisi 17, Surabaya : BP2I
- Irtanto, 2006, *Konflik Elit Politik Lokal Dalam Proses Pilkada Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*, Jurnal Cakrawala, Vol 1, No.1, Surabaya : Balitbang Prov Jawa Timur.
- _____, 2009, *Persepsi Masyarakat Kota Surabaya Terhadap Pelaksanaan Pilkada*, Jurnal Cakrawala, Vol 3, No.1, Surabaya : Balitbang Prov Jawa Timur.
- Moch. Nurhasim, 2010, *Konflik Dalam Pilkada langsung : Studi Tentang Penyebab Dan Dampak Konflik*, Jurnal Penelitian Politik, Vol 7, No.2, Jakarta : LIPI.
- Ratna Setyarahajoe, 2007, *Pilkada Proses Pendewasaan Politik Masyarakat Lokal*, Buletin Teropong Edisi 28, Juli – Agustus, ISSN 1412-8829, Surabaya : Balitbang Prov Jawa Timur.
- _____, 2013, *Mapping Conflict Anarkhists Between The Election Candidate Support Regional Head, (general Election) And Prevention Through Communications Political Formula*, Jurnal Academic Research International, Vol.4. No.5. September 2013, Pakistan : www.savap.org.pk .
- Romli, lili., 2005, *Pilkada Langsung, Otonomi Dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Jurnal Analisis CSIS, Vol 34, No.3.

D. Internet

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2310207-pengertian-golput>